



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH TAMANTIRTO
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 04 TAHUN 2023
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKalurahan, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759)
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 36);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 38);
39. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);

40. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
41. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
42. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);
45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 15);

46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 18).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 KALURAHAN TAMANTIRTO.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
Sebelumnya	Rp. 5.116.438.799,-
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 74.700.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.021.238.799,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 20.500.000,-
 Sesudahnya	 Rp. 5.099.083.460,-
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 59.600.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.013.017.126,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 25.966.334,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 2.466.908.148,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 2.405.665.209,-
Berlebih / berkurang*	: Rp. (61.242.939),-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 2.194.299.198,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 2.206.805.943,-
Berlebih / berkurang*	: Rp. 12.506.745,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 451.215.400,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 453.855.400,-
Berlebih / berkurang	: Rp. 2.640.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 523.535.925,30
➤ Sesudahnya	: Rp. 543.785.925,30
Berlebih / berkurang	: Rp. 20.250.000,-

e. Bidang Tak Terduga :

➤ Sebelumnya	: Rp. 478.195.361,-70
➤ Sesudahnya	: Rp. 481.133.538,-70
Berlebih / berkurang	: Rp. 2.938.177,-

Jumlah Belanja Sebelumnya Rp. 6.114.154.033,-

Jumlah Belanja Sesudahnya Rp. 6.091.246.016,-

Berlebih/berkurang Rp (22.908.017),-

3. Pembiayaan Kalurahan Sebelumnya

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.072.715.234,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 997.715.234,-

4. Pembiayaan Kalurahan Sesudahnya

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.077.162.556,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 85.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 992.162.556,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah Tamantirto menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto
pada tanggal 11 Oktober 2023

LURAH TAMANTIRTO,

WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto
pada tanggal 11 Oktober 2023

CARIK TAMANTIRTO,

SULIARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2023 NOMOR 04

NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL (13/Tamantirto/2023)

Salinan sesuai aslinya
Ani Carik Tamantirto
Kepala Urusan Pangripta,

ANNAAS SULISTYA BUDI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 4
Tahun : 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.700.000,00	59.600.000,00	(15.100.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.021.238.799,00	5.013.017.126,00	(8.221.673,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.600.000,00	26.466.334,00	5.966.334,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.116.438.799,00	5.099.083.460,00	(17.355.339,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.393.600.798,00	1.348.213.132,00	(45.387.666,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.154.845.723,50	3.179.889.777,50	25.044.054,00	
5.3.	Belanja Modal	1.087.512.149,80	1.082.009.567,80	(5.502.582,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.195.361,70	481.133.538,70	2.938.177,00	
	JUMLAH BELANJA	6.114.154.033,00	6.091.246.016,00	(22.908.017,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(997.715.234,00)	(992.162.556,00)	5.552.678,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.072.715.234,00	1.077.162.556,00	4.447.322,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.072.715.234,00	1.077.162.556,00	4.447.322,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	997.715.234,00	992.162.556,00	14.447.322,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 Lurah Tamantirto, 11 October 2023
 Winda Adi

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 4
Tahun : 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.700.000,00	59.600.000,00	(15.100.000,00)		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	4.400.000,00	2.400.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	72.700.000,00	55.200.000,00	(17.500.000,00)		
4.2.	Pendapatan Transfer	5.021.238.799,00	5.013.017.126,00	(8.221.673,00)		
4.2.1.	Dana Desa	1.914.628.000,00	1.914.628.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	727.627.199,00	725.412.926,00	(2.214.273,00)		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.352.088.600,00	1.352.088.600,00	0,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	651.895.000,00	845.887.600,00	(6.007.400,00)		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.500.000,00	26.466.334,00	5.966.334,00		
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	500.000,00	500.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	20.000.000,00	25.966.334,00	5.966.334,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	5.116.438.799,00	5.099.083.460,00	(17.355.339,00)		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.466.908.148,00	2.405.666.209,00	(61.242.939,00)		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Silap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.864.075.926,00	1.819.113.260,00	(44.962.666,00)		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.295.520,00	67.295.520,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	67.295.520,00	67.295.520,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		674.374.068,00	668.712.068,00	(5.662.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai		674.374.068,00	668.712.068,00	(5.662.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		10.932.000,00	10.932.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		10.932.000,00	10.932.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)		360.289.310,00	346.289.310,00	(14.000.000,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		360.289.310,00	346.289.310,00	(14.000.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam		19.735.818,00	22.135.818,00	2.400.000,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		19.735.818,00	22.135.818,00	2.400.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		90.450.000,00	96.225.000,00	5.775.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		90.450.000,00	96.225.000,00	5.775.000,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuska dan LKK		48.413.666,00	11.880.000,00	(36.533.666,00)	
1.1.90	Belanja Pegawai		48.413.666,00	11.880.000,00	(36.533.666,00)	
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bani		95.964.644,00	92.772.644,00	(3.192.000,00)	
1.1.92	Belanja Pegawai		95.964.644,00	92.772.644,00	(3.192.000,00)	
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Ba		11.040.900,00	11.040.900,00	0,00	
1.1.93	Belanja Pegawai		11.040.900,00	11.040.900,00	0,00	
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan		118.056.000,00	118.056.000,00	0,00	
1.1.97	Belanja Pegawai		118.056.000,00	118.056.000,00	0,00	
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honor		235.224.000,00	235.224.000,00	0,00	
1.1.98	Belanja Pegawai		235.224.000,00	235.224.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		60.890.591,00	80.013.318,00	19.122.727,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		16.280.000,00	25.880.000,00	9.600.000,00	
1.2.01	Belanja Modal		16.280.000,00	25.880.000,00	9.600.000,00	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasana Kantor Desa	44.610.591,00	54.133.316,00	9.522.727,00	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.185.500,00	31.185.500,00	0,00	
1.2.02	5.3	Belanja Modal	13.425.091,00	22.947.818,00	9.522.727,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	115.786.000,00	70.666.000,00	(45.100.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	48.720.000,00	22.170.000,00	(26.550.000,00)	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	22.170.000,00	(26.550.000,00)	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.810.000,00	6.060.000,00	250.000,00	
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.810.000,00	6.060.000,00	250.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Keniskinian Desa secara Partisipatif	61.236.000,00	42.436.000,00	(18.800.000,00)	
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	61.236.000,00	42.436.000,00	(18.800.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	247.577.000,00	255.424.000,00	7.847.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	5.531.000,00	5.531.000,00	0,00	
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.531.000,00	5.531.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non R	26.204.500,00	26.204.500,00	0,00	
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.204.500,00	26.204.500,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	27.547.000,00	23.575.000,00	(3.972.000,00)	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.547.000,00	23.575.000,00	(3.972.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	26.779.000,00	22.875.000,00	(3.904.000,00)	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.779.000,00	22.875.000,00	(3.904.000,00)	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	12.994.500,00	13.444.500,00	450.000,00	
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.994.500,00	13.444.500,00	450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	14.567.000,00	11.636.000,00	(2.931.000,00)	
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.567.000,00	11.636.000,00	(2.931.000,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.733.000,00	24.233.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.733.000,00	24.233.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka, Kewilayahan	33.741.000,00	51.165.000,00	17.424.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.741.000,00	51.165.000,00	17.424.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	67.240.000,00	70.520.000,00	3.280.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.240.000,00	70.520.000,00	3.280.000,00	
1.4.94		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	178.598.631,00	180.448.631,00	1.850.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.570.000,00	44.420.000,00	(1.150.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.570.000,00	44.420.000,00	(1.150.000,00)	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	112.840.631,00	112.840.631,00	0,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	112.840.631,00	112.840.631,00	0,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	7.133.000,00	10.133.000,00	3.000.000,00	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.133.000,00	10.133.000,00	3.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.194.299.198,00	2.206.805.943,00	12.506.745,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	260.744.979,00	166.497.850,00	(94.247.129,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/PTA/KA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (90.639.700,00	79.163.850,00	(11.475.850,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.639.700,00	79.163.850,00	(11.475.850,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	158.611.279,00	80.000.000,00	(78.611.279,00)	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.266.000,00	80.000.000,00	(13.266.000,00)	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	65.345.279,00	0,00	(65.345.279,00)	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bx	4.160.000,00	0,00	(4.160.000,00)	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	0,00	(4.160.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.334.000,00	7.334.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.334.000,00	7.334.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	667.014.670,00	572.966.465,00	(94.048.205,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	150.337.200,00	186.056.200,00	35.719.000,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	150.337.200,00	186.056.200,00	35.719.000,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	25.679.970,00	16.829.715,00	(8.850.255,00)		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	25.679.970,00	16.829.715,00	(8.850.255,00)		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.705.500,00	60.335.500,00	13.630.000,00		
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	46.705.500,00	60.335.500,00	13.630.000,00		
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	332.152.000,00	218.960.050,00	(113.191.950,00)		
2.2.09	Belanja Barang dan Jasa	332.152.000,00	218.960.050,00	(113.191.950,00)		
2.2.52	Pembinaan Kampung KB	21.855.000,00	11.950.000,00	(9.905.000,00)		
2.2.52	Belanja Barang dan Jasa	21.855.000,00	11.950.000,00	(9.905.000,00)		
2.2.53	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00		
2.2.53	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00		
2.2.93	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	51.100.000,00	37.650.000,00	(13.450.000,00)		
2.2.94	Belanja Barang dan Jasa	51.100.000,00	37.650.000,00	(13.450.000,00)		
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DIJ)	10.205.000,00	12.205.000,00	2.000.000,00		
2.2.96	Belanja Barang dan Jasa	10.205.000,00	12.205.000,00	2.000.000,00		
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00		
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	717.662.012,00	758.381.982,00	40.719.970,00		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	56.651.435,00	97.371.405,00	40.719.970,00		
2.3.03	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00		
2.3.03	Belanja Modal	56.651.435,00	96.671.405,00	40.719.970,00		
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	154.804.841,50	154.804.841,50	0,00		
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	60.824.897,50	60.824.897,50	0,00		
2.3.05	Belanja Modal	93.979.944,00	93.979.944,00	0,00		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	506.205.735,50	506.205.735,50	0,00		
2.3.11	Belanja Barang dan Jasa	335.955.000,00	335.955.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.11	5.3	Belanja Modal	170.250.735,50	170.250.735,50	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	275.772.659,00	275.772.659,00	0,00	
2.4.01	5.2	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	105.716.000,00	105.716.000,00	0,00	
2.4.01	5.3	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	
2.4.01	5.3	Belanja Modal	105.036.000,00	105.036.000,00	0,00	
2.4.10	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	12.720.700,00	12.720.700,00	0,00	
2.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.4.10	5.3	Belanja Modal	12.690.700,00	12.690.700,00	0,00	
2.4.83	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan Talut	110.707.003,00	110.707.003,00	0,00	
2.4.83	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.101.000,00	4.101.000,00	0,00	
2.4.83	5.3	Belanja Modal	106.606.003,00	106.606.003,00	0,00	
2.4.94	5.2	Pembangunan taman/rehabilitasi/pemeliharaan taman	46.628.956,00	46.628.956,00	0,00	
2.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.4.94	5.3	Belanja Modal	46.478.956,00	46.478.956,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	208.989.800,00	373.081.909,00	164.092.109,00	
2.6.02	5.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	32.625.000,00	32.625.000,00	0,00	
2.6.02	5.3	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	
2.6.02	5.3	Belanja Modal	29.265.000,00	29.265.000,00	0,00	
2.6.90	5.2	Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kelurahan	52.890.000,00	67.921.309,00	15.031.309,00	
2.6.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.890.000,00	67.921.309,00	15.031.309,00	
2.6.91	5.2	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	91.769.800,00	236.153.600,00	144.383.800,00	
2.6.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	91.769.800,00	236.153.600,00	144.383.800,00	
2.6.92	5.2	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarai	31.715.000,00	36.382.000,00	4.667.000,00	
2.6.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.715.000,00	36.382.000,00	4.667.000,00	
2.6.01		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60.105.078,00	60.105.078,00	0,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	33.884.000,00	33.884.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	727.000,00	727.000,00	0,00	
2.6.01	5.3	Belanja Modal	33.157.000,00	33.157.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.3	Belanja Modal	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	9.721.078,00	9.721.078,00	0,00	
2.6.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	215.400,00	215.400,00	0,00	
2.6.06	5.3	Belanja Modal	9.505.678,00	9.505.678,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAAN KEMASYARAKATAN	451.215.400,00	453.855.400,00	2.640.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	84.554.100,00	139.699.100,00	55.145.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	14.535.000,00	95.535.000,00	81.000.000,00	
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.535.000,00	95.535.000,00	81.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencan	28.929.100,00	21.574.100,00	(7.355.000,00)	
3.1.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.129.100,00	19.774.100,00	(7.355.000,00)	
3.1.92	5.3	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	33.280.000,00	14.780.000,00	(18.500.000,00)	
3.1.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.280.000,00	14.780.000,00	(18.500.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	206.296.300,00	186.141.300,00	(20.155.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Ikt. Kec	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	
3.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANOMARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT Belanja Barang dan Jasa	97.731.300,00	93.156.300,00	(4.575.000,00)	
3.2.03	5.2	97.731.300,00	93.156.300,00	(4.575.000,00)	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	
3.2.04	5.2	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	
3.2.05	Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kej Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	44.800.000,00	4.000.000,00	
3.2.05	5.2	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.05	5.3	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
3.2.50	Pembinaan Bidang Keagamaan Belanja Barang dan Jasa	28.830.000,00	23.350.000,00	(5.480.000,00)	
3.2.51	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.350.000,00	(150.000,00)	
3.2.91	5.2	23.500.000,00	13.400.000,00	(10.100.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.375.000,00	70.080.000,00	(2.295.000,00)	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa	40.430.000,00	40.430.000,00	0,00	
3.3.03	5.2	40.430.000,00	40.430.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa	31.945.000,00	29.650.000,00	(2.295.000,00)	
3.3.06	5.2	31.945.000,00	29.650.000,00	(2.295.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.990.000,00	57.835.000,00	(30.055.000,00)	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	
3.4.02	5.2	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK Belanja Barang dan Jasa	19.160.000,00	20.360.000,00	1.200.000,00	
3.4.03	5.2	19.160.000,00	20.360.000,00	1.200.000,00	
3.4.50	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	6.025.000,00	(31.255.000,00)	
3.4.50	5.2	37.280.000,00	6.025.000,00	(31.255.000,00)	
3.4.93	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak Belanja Barang dan Jasa	27.815.000,00	27.815.000,00	0,00	
3.4.93	5.2	27.815.000,00	27.815.000,00	0,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	523.535.925,30	543.785.925,30	20.250.000,00	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	53.772.862,00	53.772.862,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.03	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat M		29.523.962,00	29.523.962,00	0,00	
4.1.03	Belanja Barang dan Jasa		13.839.900,00	13.839.900,00	0,00	
4.1.03	Belanja Modal		15.684.062,00	15.684.062,00	0,00	
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/di)		24.248.900,00	24.248.900,00	0,00	
4.1.05	Belanja Barang dan Jasa		24.248.900,00	24.248.900,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>247.920.515,00</u>	<u>247.920.515,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peti		5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa		5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		106.051.015,00	106.051.015,00	0,00	
4.2.06	Belanja Barang dan Jasa		750.000,00	750.000,00	0,00	
4.2.06	Belanja Modal		105.301.015,00	105.301.015,00	0,00	
4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, PJA) dan		108.302.500,00	108.302.500,00	0,00	
4.2.90	Belanja Barang dan Jasa		108.302.500,00	108.302.500,00	0,00	
4.2.95	Pemeliharaan Angkat Walet		18.252.000,00	18.252.000,00	0,00	
4.2.95	Belanja Barang dan Jasa		256.000,00	256.000,00	0,00	
4.2.95	Belanja Modal		17.996.000,00	17.996.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>0,00</u>	<u>20.250.000,00</u>	<u>20.250.000,00</u>	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>89.117.048,30</u>	<u>89.117.048,30</u>	<u>0,00</u>	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas		18.668.620,30	18.668.620,30	0,00	
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa		50.000,00	50.000,00	0,00	
4.4.03	Belanja Modal		18.618.620,30	18.618.620,30	0,00	

Printed by: 10/10/2023 9:18:06 PM

Halaman 9

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.4.51	Pembinaan/Perkuliahan/Pendampingan Korban Kekerasan/KORTIBina Kelu	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
4.4.51	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
4.4.54	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja)	66.273.428,00	66.273.428,00	0,00	
4.4.54	Belanja Barang dan Jasa	66.273.428,00	66.273.428,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	107.790.500,00	107.790.500,00	0,00	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	52.830.000,00	52.830.000,00	0,00	
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa	52.830.000,00	52.830.000,00	0,00	
4.5.50	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat da	54.960.500,00	54.960.500,00	0,00	
4.5.50	Belanja Barang dan Jasa	54.960.500,00	54.960.500,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	478.195.361,70	481.133.538,70	2.938.177,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	243.072.716,70	243.377.638,70	304.922,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	
5.1.01	Sarana Prasarana Tanggap Darurat	8.072.716,70	8.377.638,70	304.922,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	8.072.716,70	8.377.638,70	304.922,00	
5.2	Sub Bidang Keadan Darurat	14.922.645,00	17.555.900,00	2.633.255,00	
5.2.00	Penanganan Keadan Darurat	14.922.645,00	17.555.900,00	2.633.255,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	14.922.645,00	17.555.900,00	2.633.255,00	
5.3	Sub Bidang Keadan Mendesas	220.200.000,00	220.200.000,00	0,00	
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3.03		Bantuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3.04		Bantuan Pengobatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	6.114.154.033,00	6.091.246.016,00	(22.908.017,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(997.715.234,00)	(992.162.556,00)	5.552.678,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.072.715.234,00	1.077.162.556,00	4.447.322,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.072.715.234,00	1.077.162.556,00	4.447.322,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	997.715.234,00	992.162.556,00	14.447.322,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 LURAH TAMALITEIRO
 Kepala Kantor
 Kecamatan Tamaliteiro
 Kabupaten Kutai Timur
 Kalimantan Timur, 11 October 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat: Jl. Madukismo No 252 Tirtomirmolo Kasihan Bantul 55181,
Telp (0274) 377597, Fax (0274) 411275
Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN

NOMOR : 43 Tahun 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU KASIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, wajib dimintakan evaluasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

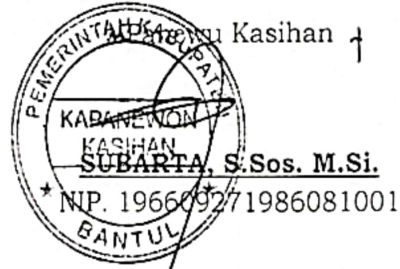
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2032 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 2 Oktober 2023



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

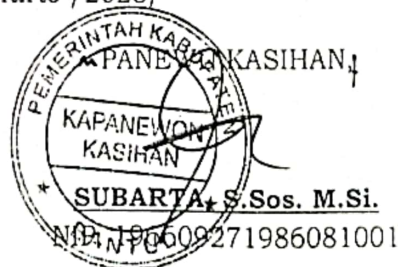
1. Inspektur Kabupaten Bantul
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
4. Bamuskal Tamantirto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN
NOMOR : 43 TAHUN 2023
Tanggal : 2 OKTOBER 2023

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.
 - A. Legal Drafting
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
 - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
 1. Judul Raperkal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran F.1
 2. Dasar hukum sudah sesuai
 3. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Hasil Evaluasi :
Rincian belanja pada lampiran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah sesuai.
 - C. Nomor Register Peraturan Kalurahan
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul (/ Tamantirto /2023)



CERLIST EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN Perubahan APBKAL TAHUN 2023
 KALURAHAN TAMANTIRTO

NO	URAIAN	KETERANGAN
A.	Legal Drafting	
1	Penggunaan huruf "bookman old style" dengan ukuran 12	Sudah
2	Kop Perdes dengan lambang Garuda	Sudah
3	Nomor register Kapanewon	
4	Kesesuaian Dasar Hukum	
5	UU NO 13 tahun 2021 Keistimewaan DIY	Sudah
6	UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah
7	PP no 43 Th 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah
8	PP no 60 th 2014 tentang DD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara	Sudah
9	Permendagri no 131 th 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa	Sudah
10	Permendagri no 44 th 2016 tt Kewenangan Desa	Sudah
11	Permendagri no 20 th 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah
12	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Belum
13	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Belum
14	Permendes PDTT No 21 th 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Sudah
15	Permendes PDTT No 8 th 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa th 2023	Sudah
16	Peraturan Gubernur DIY no 34 th 2017 tt pemanfaatan Tanah Desa	Sudah
17	Peraturan Gubernur no 2 th 2020 tt pedoman pemerintah kalurahan	Sudah
18	Peraturan Gubernur DIY no 100 th 2020 tt pedoman pelaksanaan BKK	Sudah
19	Perda Kab. Bantul no 9 th 2019 tt penetapan Kalurahan	Sudah
20	Perda Kab. Bantul no 5 th 2020 tt Pamong Kalurahan	Sudah
21	Perda kab. Bantul no 8 th 2020 tt Bamuskal	Sudah
22	Peraturan Bupati Bantul no 76 th 2019 tt Siklus tahunan Desa	Sudah
23	Perbup Bantul no.134 Tahun 2019 tt pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul no. 128 th 2020	Sudah
24	Peraturan Bupati Bantul No. 86 th 2020 tt Kewenangan Kalurahan	Sudah
25	Peraturan Bupati Bantul No 87 th 2020 tt pedoman teknis penyusunan produk hukum kalurahan	Sudah
26	Peraturan Bupati Bantul no 134 th 2020 tt tata naskah dinas bagi pemerintah kalurahan	Sudah
27	Peraturan Bupati Bantul no 23 th 2021 pedoman pemberian BKK pada kalurahan	Sudah
28	Peraturan Bupati Bantul No. 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022	Sudah
29	Peraturan Bupati Bantul no 59 th 2022 tt Pengelolaan keuangan desa	Sudah
30	Peraturan Bupati Bantul no 60 th 2022 tt tata cara pengadaan barang/jasa di kalurahan	Sudah
31	Peraturan Bupati Bantul no 125 th 2022 tt Pengelolaan dana desa TA 2023	Sudah
32	Peraturan Bupati Bantul no 148 th 2022 tt Tata cara pengalokasian ADD dan besaran ADD untuk setiap kalurahan TA 2023	Sudah
33	Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal.	Sudah
34	Peraturan Kal. pungutan Kal.	Sudah
35	Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah
36	Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah
37	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
38	Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2023	Sudah
39	Peraturan Kal. tt APBKal Tahun 2023	Sudah
B.	Substansi	
1	Kesesuaian jumlah Dana Transfer	Sudah
2	Prioritas penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor	Sudah
3	SILPA Th lalu telah digunakan seluruhnya	Sudah
4	Silap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional kalurahan/Bamuskal, Insentif RT ≤ 30 % APBKal	Sudah
5	Kode/rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Perbup Bantul No. 103 Tahun 2022	Sudah

NO.	URAIAN	KETERANGAN	
6	BLT DD maksimal 25%, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dari pagu DD murni 2023	Sudah	
C.	Persyaratan Kelengkapan Tambahan		
1	Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal perubahan apbkal (lihat tanggal keputusan)	Sudah	
2	Keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal perubahan apbkal (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Sudah	
3	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah	
4	Peraturan Kal. tentang RKP kal 2023	Sudah	
Catatan :			
<p>A. Peraturan yang belum mohon untuk dimasukkan dalam konsiderans</p> <p>B. Penulisan Nomor pada UU Desa, tidak menggunakan angka nol (0)</p> <p>C. Peraturan Presiden RI dicantumkan yang terbaru, yaitu Nomor 130 Tahun 2022</p> <p>D. PMK agar dicantumkan yang terbaru, yaitu PMK No.98 Tahun 2023</p> <p>E. Rancangan Perkal Perubahan APBKal harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari Kapanewon kemudian dimintakan nomor register</p>			



Kasihan, 2 Oktober 2023

Panewu Kasihan

SUBAKTA, S.Sos. M.Si

NIP. 1964071986081001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275
Email. kec.kasihan@bantulkab.go.id, Website. <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 10 Oktober 2023

Kepada

Nomor : B/400.10.2.2/00087/KAP.KAS
Sifat : IHAN/2023
Lampiran : Biasa
Hal : -

Yth. Lurah Tamantirto
di - Kasihan

Noreg Raperkal Tamantirto
Perubahan APBKal 2023

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tamantirto Nomor B/400.10.2.2/00194 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (2) Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yaitu :

13/Tamantirto/2023

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Panewu Kasihan,



SUBARTA, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196609271986081001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Bamuskal Tamantirto
2.

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

[illegible]

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07 TAHUN
2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBKal, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan kurangnya anggaran digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*), maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dikeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tamantirto tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47).
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);

35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 36);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 38);
44. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
45. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);
46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

50. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 15);
51. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
52. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto
Pada tanggal : 27 September 2023

Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto
Ketua



(SURANTO)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
2. Apabila dikemudian hari terdapat Devisit Anggaran maka wewenang penuh berada di Pemerintah Kalurahan Tamantirto.
3. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Evaluasi Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
4. Setelah Mendapatkan Evaluasi untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Perubahan Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TAMANTIRTO



WISNU ARDI

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL



SURANTO